

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011).

Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli as-Syariah, Juz II, Al-Haiiah al-Mishriyyah al-Ammah lil Kitab*, (Kairo, 2006).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001).

Arif Furqan, et al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).

Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005).

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

Habib Ajie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Ibnu Ishaq dalam Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz III, Dar al-Kotob al-Ilmiyah*, (Beirut, 1994,).

M.J.A. van Mourik, "Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World", *media Notariat, No. 22-23-24-25, Jan-Juli-oktober 1992*, Ikatan Notaris Indonesia 1992.

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).

Ord. Stbl. 1860 no. 3, Peraturan Jabatan Notaris,

Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*,(Surabaya:Majalah Yuridika, Edisi V,1997).

Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sigian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001).

Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung: makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000)

B. Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Hukum Perdata JO Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum pengaturan Notaris, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.

Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung: makalah disampaikan pada

pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000).

D. Internet

www.thelawdictionary.org

www.kbbi.web.id